

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut dengan *Sustainable Development Goals* dinilai sebagai kesepakatan pembangunan global secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015 di New York. SDGs berisi agenda pembangunan berkelanjutan dengan mengidentifikasi 17 tujuan yang akan dicapai oleh negara-negara yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2030 (Fu et al., 2019). Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap pengungkapan SDGs dengan menetapkan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 pasal 3 menyebutkan bahwa sasaran nasional yang selaras dengan SDGs tidak hanya sebagai pedoman bagi organisasi pemerintah, tetapi juga organisasi non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penerapan SDGs di Indonesia. Menurut Perpres Nomor 59 Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia didaulat sebagai koordinator pelaksana SDGs di Indonesia.

Terkait dengan implementasi SDGs di perusahaan publik di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2019 yang mana peraturan tersebut mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Penerapan keuangan berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan prinsip investasi bertanggungjawab, prinsip strategi dan praktek bisnis berkelanjutan, prinsip

pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip tata kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas, serta prinsip koordinasi dan kolaborasi (Sindhu & Farihah, 2022). Peraturan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Presiden tersebut menjadi bukti yang meyakinkan untuk implementasi SDGs di perusahaan publik Indonesia. Sesuai dengan penjelasan di atas, pada penelitian ini objek penelitian yang dipakai adalah laporan tahunan dan laporan berkelanjutan untuk seluruh perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan memiliki tanggung jawab atas operasional yang dilakukannya pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola. Tanggung jawab yang harus dilakukan tersebut dikatan belum maksimal yang ditandai pada banyak perusahaan di Indonesia yang hanya berfokus pada nilai atau laba perusahaan dan tidak mementingkan tata kelola kedepan yang baik (Arifianti & Widianingsih, 2022). Dilansir dari Liputan6.com (2022) masih banyak perusahaan manufaktur yang belum memiliki kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Tercatat saat ini hanya ada 27% perusahaan yang siap mengintegrasikan SDGs kedalam *supply chain* dan pelaporan tata kelola perusahaan sehingga penelitian ini akan membahas pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di perusahaan sektor manufaktur.

Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh perusahaan merupakan penerapan dari teori legitimasi. Teori legitimasi dianggap sebagai sumber daya bagi perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha (Dowling & Pfeffer, 1975). Suatu perusahaan mungkin memiliki beberapa sumber daya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya atau mungkin menerapkan kebijakan tertentu sehingga dapat diakui dan diterima masyarakat. Adapun strategi terkait legitimasi dapat berupa pengungkapan aktivitas tanggung

jawab sosial ataupun pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan SDGs dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, dan ROA.

Faktor pertama yang mempengaruhi SDGs adalah komisaris independen adalah susunan manajerial perusahaan yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kriteria merupakan anggota dari luar perusahaan sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota dewan komisaris harus bersikap independen (Kristian & Siswanto, 2022). Menurut Setiawan et al (2019) dewan komisaris merupakan unsur perusahaan yang bertugas untuk mengawasi dan memberi saran secara independen kepada direksi karena memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dewan direksi melakukan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan tata kelola perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sánchez et al (2022) dan Gold & Tain (2023) yang menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya peran dewan komisaris dalam perusahaan dapat meningkatkan kesadaran untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Idawati & Hanifah (2022) yang menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *sustainable report* dengan *Sustainable Development Goals* yang berarti bahwa perusahaan yang sudah memiliki dewan komisaris independen belum tentu dapat mendorong perusahaan untuk menyajikan pengungkapan laporan berkelanjutan.

Faktor kedua yang mempengaruhi SDGs adalah kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota manajemen perusahaan (Hoang et al., 2019). Menurut Alvin & Susanto (2022) kepemilikan manajerial merupakan bentuk peran ganda yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan berperan sebagai

pihak manajemen internal perusahaan dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial menjadi faktor penting dalam struktural perusahaan karena manajer perusahaan memiliki saham dari perusahaan yang dikelolanya sehingga dapat menunjukkan tingkat kekuasaan manajer pada perusahaan, jika semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka kekuasaan manajer terhadap perusahaan akan semakin luas dan pengaruh yang dimiliki manajer, besarnya pengaruh kekuasaan tersebut dapat meningkatkan suara pengambilan keputusan atas strategi dan pelaporan yang dapat menguntungkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Cho & Ryu (2022) dan Purwanto et al (2022) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*. Hal tersebut mengatakan bahwa tingginya kepemilikan yang dimiliki manajerial perusahaan dapat menimbulkan tekanan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan perusahaan. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Idawati & Hanifah (2022) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals*, sehingga besarnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tata kelola keberlanjutan perusahaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi SDGs komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance menjelaskan bahwa komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang bertanggung jawab untuk memeriksa perusahaan sehingga akan mempertahankan independensinya (KNKG, 2006). Komite audit adalah sekumpulan individu yang ditunjuk untuk mengawasi dan menilai jalannya pelaporan perusahaan yang mengharuskan adanya komunikasi dan koordinasi antar anggota audit untuk menjalankan tanggung jawab

pekerjaannya (Roviqoh & Khafid, 2022). Menurut Sofa & Respati (2020) seiring dengan penyelenggaraan rapat dan integritas komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan efektivitas pengendalian internal termasuk mengenai keterbukaan informasi berupa *Sustainable Development Goals*. Penelitian yang dilakukan oleh Buallay & Al-Ajmi (2020) dan Tumwebaze et al (2022) menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan SDGs. Hal tersebut menunjukkan besarnya pengaruh yang dimiliki oleh komite audit untuk memastikan pengungkapan laporan keberlanjutan dalam perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana et al (2022) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019 hal tersebut dikarenakan komite audit hanya berfokus pada penyelesaian temuan audit dan menilai kualitas laporan keuangan dan tidak berfokus secara luas pada pengungkapan laporan berkelanjutan.

Faktor keempat yang mempengaruhi SDGs adalah ROA (*Return on Assets*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aset yang tersedia dan daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan (Sumardi & Suharyono, 2020:28). ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang paling sering disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Ash-Shiddiqy, 2019). Semakin tinggi nilai ROA yang menjadi pengukur profitabilitas maka semakin tinggi pula informasi yang diberikan oleh perusahaan salah satunya pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Liana (2019) menjelaskan bahwa ROA sebagai pengukuran profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hubungan positif dapat ditimbulkan antara profitabilitas

dengan inisiatif manajer dalam mengungkapkan sustainability report. Hal ini menunjukkan dimana pihak manajemen ingin meyakinkan investor mengenai profitabilitas dan kompetensi manajemen, sehingga para stakeholder dapat menginvestasikan dananya.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Trisnawati (2022) menjelaskan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan ROA berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki kesehatan ekonomi yang tinggi akan menunjukkan sedikitnya pengaruh SDGs karena perusahaan yang berorientasi pada profit dianggap menganggap bahwa dengan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial hanya akan mengurangi nilai profit yang dimiliki perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulisyawati & Qadriatin (2019) menjelaskan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga menunjukkan bahwa jumlah ROA pada perusahaan tidak dapat perusahaan untuk menyajikan pengungkapan laporan berkelanjutan

Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Idawati & Hanifah (2022) yang meneliti mengenai dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini akan menambahkan variabel bebas yaitu ROA untuk mengukur profitabilitas perusahaan, penambahan variabel tersebut dikarenakan ROA dapat mendukung pengungkapan laporan keberlanjutan sehingga organisasi dengan profitabilitas yang tinggi cenderung akan berusaha untuk membuktikan kepada masyarakat atau publik dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak daripada organisasi lain pada bidang yang sama (Setiawan et al., 2022). Penelitian mengenai SDGs belum terlalu banyak dilakukan dan masih memiliki hasil yang berbeda-beda. Hal ini diperkuat oleh Bebbington & Unerman (2020) yang menyatakan bahwa jumlah penelitian akuntansi terkait SDGs masih sedikit dikarenakan SDGs merupakan pengungkapan

keberlanjutan yang baru ditetapkan oleh pemerintah. Demikian pula berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pizzi et al (2020) yang menyatakan bahwa hanya sedikit peneliti yang mengevaluasi kualitas dari laporan SDGs dan menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat berkontribusi pada penilaian karakteristik yang mempengaruhi pelaporan SDGs perusahaan di negara lain. Van Der Waal & Thijssens (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan pentingnya mempelajari keterlibatan perusahaan dalam penerapan SDGs. Oleh karena hal tersebut, maka penelitian ini memakai perusahaan publik di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi SDGs pada perusahaan di Indonesia dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022, maka peneliti memilih judul “PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT DAN ROA TERHADAP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020 -2022)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara komite audit terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) ?
4. Apakah terdapat pengaruh antara ROA terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh ROA terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah literatur sumbangan pemeriksaan, referensi dan teori terkait pembahasan *Sustainable Development Goals* (SDGs), komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan ROA yang dapat digunakan penelitian-penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan manufaktur, kegunaan praktis dan pemahaman tentang praktik *sustainable development goals*, diharapkan bisa didapatkan. Perpres Nomor 59 Tahun 2019 menyatakan bahwa sasaran nasional yang selaras dengan SDGs tidak hanya sebagai

pedoman bagi organisasi pemerintah, tetapi juga organisasi non-pemerintah. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.